

# Sanksi Etik Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi: Friksi Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Keputusan Atas Pelanggaran Etik: Perspektif Kepastian Hukum = Ethical Sanctions of the Honorary Council of the Constitutional Court: Frictions in the Authority of the State Administrative Court in Adjudicating Decisions on Ethical Violations: A Legal Certainty Perspective

Alif Wili Utama, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920564940&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Tesis menganalisis bagaimana kekuatan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai lembaga etik dalam bingkai kepastian hukum dan kaitannya dengan pembatasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memeriksa gugatan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan atas pelanggaran etik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode Penelitian doktrinal. Tesis ini menunjukkan bahwa Kekuatan Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 mengalami ketidakpastian eksekusi (uncertainty in execution). Ketidakpastian ini muncul seiring dengan Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang mengubah beberapa substansi pokok dalam Putusan MKMK yakni, pencabutan Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 maupun pemulihian harkat dan martabat Anwar Usman yang merupakan substansi sanksi etik dalam Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Ketidakpastian ini membuat Putusan MKMK sebagai putusan etik harus menunggu Putusan Pengadilan untuk dapat dieksekusi secara sempurna. Tidak adanya kepastian hukum yang mempertegas perbedaan kedudukan MKMK membuat posisi MKMK dipersamakan dengan lembaga etik lain yang Putusannya dapat diuji dalam Sengketa Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tindak Lanjut atas Putusan Etik. Sehingga, hal ini dapat berimplikasi pada dualisme penegakan etik yang berbelit-belit dengan praktik pembatalan substansi Putusan MKMK oleh PTUN. Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara ini seharusnya memberikan batasan tegas terkait kewenangan pemeriksaan etik dan pemeriksaan hukum agar tidak memunculkan potensi preseden baru bahwa semua putusan etik dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks Kenegaraan, mendudukkan MKMK sebagai supervisory body yang independen dan mandiri, Putusannya bersifat final dan mengikat, serta mendudukkannya sebagai lembaga Negara yang diatur dalam undang-undang dasar sebagaimana Konstitusi Armenia, Albania maupun Thailand merupakan formulasi yang kuat untuk mendukung tegaknya penegakan etik Hakim Konstitusi dan juga adanya titik terang jelaskan mekanisme antara penegakan etik maupun penegakan hukum.

.....The thesis analyzes how the strength of the Decision of the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK) as an ethical institution in the frame of legal certainty and its relation to the limitation of the authority of the State Administrative Court (PTUN) in examining the lawsuit of State Administrative Decisions (KTUN) issued for ethical violations of the Chairman of the Constitutional Court (MK) through Decision Number 604/G/2023/PTUN.JKT. This thesis was prepared using the doctrinal research method. This thesis shows that the power of MKMK Decision Number 2/MKMK/L/11/2023 experiences uncertainty in execution. This uncertainty arises along with Decision Number 604/G/2023/PTUN.JKT which changes

some of the main substances in the MKMK Decision, namely, the revocation of Constitutional Court Decision Number 17 of 2023 and the restoration of Anwar Usman's dignity which is the substance of ethical sanctions in MKMK Decision Number 2/MKMK/L/11/2023. This uncertainty makes the MKMK Decision as an ethical decision must wait for a Court Decision to be fully executed. The absence of legal certainty that emphasizes the difference in MKMK's position makes MKMK's position equalized with other ethical institutions whose decisions can be tested in State Administrative Disputes in the form of Follow-up Decisions on Ethical Decisions. Thus, this can have implications for the dualism of ethical enforcement that is convoluted with the practice of canceling the substance of MKMK's Decision by the State Administrative Court. The State Administrative Court in this case should provide strict limits regarding the authority of ethical examination and legal examination so as not to create a potential new precedent that all ethical decisions can become objects of dispute in the State Administrative Court. In the context of the State, placing the MKMK as an independent and independent supervisory body, its decision is final and binding, and placing it as a State institution regulated in the basic law as in the Constitutions of Armenia, Albania and Thailand is a strong formulation to support the enforcement of the ethics of Constitutional Judges and also a clear point of clarity in the mechanism between ethical enforcement and law enforcement.